**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Agustus 2017

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 35 / SE / 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa tertentu dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan untuk pekerjaan :

1. Pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang lama;
2. Pekerjaan kompleks, dan/atau
3. Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yang berisi :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan
2. Mendorong pelaksanaan Barang/Jasa secara Terkonsolidasi
3. Mengevaluasi semua peraturan di daerah yang menghambat Percepatan Pengadaan Barang/Jasa

maka diharapkan kepada seluruh SKPD/UKPD agar :

1. Mempercepat Penetapan PPK (dapat menggunakan PPK tahun berjalan / tahun sebelumnya)
2. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018
3. Mendaftarkan PPK ke LPSE
4. Menginput Pemaketan RUP pada SPSE LKPP

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Provinsi DKI Jakarta